

**Kurikulum pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja  
bagi pengurus dan anggota Panitia Pembina  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)  
perusahaan**





© BSN 2004

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin atau menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun dan dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN  
Gd. Mangala Wanabakti  
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.  
Telp. +6221-5747043  
Fax. +6221-5747045  
Email: [dokinfo@bsn.go.id](mailto:dokinfo@bsn.go.id)  
[www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id)

Diterbitkan di Jakarta



## Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata .....	ii
Pendahuluan.....	iii
1 Ruang lingkup .....	1
2 Istilah dan definisi .....	1
3 Persyaratan .....	1
4 Kurikulum.....	2
Lampiran A Subpokok bahasan materi kurikulum pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja pengurus dan anggota P2K3 perusahaan .....	4
Bibliografi .....	9
 Tabel 1 Persyaratan kululusan .....	 2
Tabel 2 Kurikulum pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi pengurus dan anggota P2K3 perusahaan .....	 2
Tabel A.1 Subpokok bahasan materi kurikulum pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi pengurus dan anggota P2K3 perusahaan .....	 4



## Prakata

Standar pelatihan ini digunakan sebagai pedoman pelatihan yang memenuhi persyaratan kompetensi bagi pengurus dan anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) perusahaan.

Standar ini disusun oleh Subpanitia Teknis Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Panitia Teknis 94S, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Standar ini telah dikonsensuskan di Jakarta pada tanggal 3 Nopember 2003, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari pemerintah, pengusaha, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan serikat pekerja.





## Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan industri di masa mendatang, kebutuhan sumber daya manusia yang mempunyai jabatan pengurus dan anggota Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) akan sangat meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Keberadaan P2K3 perusahaan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan pada tenaga kerja.

P2K3 perusahaan merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi yang efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Tugasnya adalah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus perusahaan mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Karena itu pengurus dan anggota P2K3 perusahaan perlu diberikan pelatihan higiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja.

Untuk maksud tersebut di atas, perlu disusun standar kurikulum pelatihan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan bagi pengurus dan anggota P2K3 perusahaan.









## **Kurikulum pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi pengurus dan anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) perusahaan**

### **1 Ruang lingkup**

Standar ini memuat kurikulum pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi pengurus dan anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) perusahaan.

### **2 Istilah dan definisi**

#### **2.1**

##### **kurikulum**

serangkaian mata ajar dan pengalaman belajar yang mempunyai tujuan tertentu, yang diajarkan dengan cara tertentu dan kemudian dilakukan evaluasi

#### **2.2**

##### **kurikulum pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi pengurus dan anggota P2K3 perusahaan**

serangkaian mata ajar dan pengalaman belajar minimal yang ditetapkan untuk diajarkan dan dievaluasi dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan mengikuti uji sertifikasi kompetensi pengurus dan anggota P2K3 perusahaan di bidang hiperkes dan keselamatan kerja

#### **2.3**

##### **kompetensi**

kemampuan atau kualifikasi yang harus dicapai pada suatu bidang keahlian yang meliputi ranah kognitif, psikomotor dan afektif/sikap

#### **2.4**

##### **Panitia Pembina Keselamatan dan kesehatan Kerja (P2K3)**

badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja

#### **2.5**

##### **evaluasi**

penilaian dengan menggunakan alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta

### **3 Persyaratan**

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengikuti pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi pengurus dan anggota P2K3 perusahaan sesuai Tabel 1.



Tabel 1 Persyaratan kelulusan

No	Kegiatan	Satuan	Persyaratan
1	Evaluasi awal	1 kali	turut serta
2	Kehadiran	%	≥ 80
3	Kunjungan perusahaan	1 kali	turut serta
4	Diskusi hasil kunjungan perusahaan	1 kali	turut serta
5	Evaluasi akhir	1 kali	turut serta

#### 4 Kurikulum

- Nama program pelatihan: hiperkes dan keselamatan kerja bagi pengurus dan anggota P2K3 perusahaan.
- Tujuan kurikuler: peserta memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi bagi pengurus dan anggota P2K3 perusahaan.
- Kurikulum pelatihan: seperti Tabel 2.

**Tabel 2 Kurikulum pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi pengurus dan anggota P2K3 perusahaan**

No	Mata ajar	Jumlah jam, @ 45 menit	
		Kuliah	Praktek
A.	Umum:		
	1. Pengertian, ruang lingkup, tujuan dan sasaran hiperkes dan keselamatan kerja	2	-
	2. Kebijakan pokok Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang hiperkes dan keselamatan kerja	2	-
	3. Peraturan perundangan dan standar yang berkaitan dengan hiperkes dan keselamatan kerja	2	-
	4. Tugas pokok dan fungsi P2K3	2	-
B.	Aspek teknis:		
	1. Manajemen:		
	a) Manajemen hiperkes dan keselamatan kerja	2	-
	b) Sistim manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)	2	-
	2. Higiene perusahaan:		
	a) Kebisingan dan getaran di tempat kerja	2	-
	b) Iklim kerja panas di tempat kerja	2	-
	c) Radiasi mengion dan tidak mengion	2	-
	d) Penerangan di tempat kerja	2	-
	e) Faktor kimia di tempat kerja	2	-
	f) Faktor biologi di tempat kerja	2	-



Tabel 2 (lanjutan)

No	Mata ajar	Jumlah jam, @ 45 menit	
		Kuliah	Praktek
C	3. Kesehatan kerja:		
	a) Dasar-dasar kesehatan kerja	2	-
	b) Penyakit akibat kerja	2	-
	c) Gizi kerja	2	-
	d) Toksikologi industri	2	-
	4. Ergonomi dan psikologi kerja:		
	a) Ergonomi	2	-
	b) Fisiologi kerja	2	-
	5. Keselamatan kerja:		
	a) Keselamatan kerja umum	4	-
	b) Keselamatan kerja listrik	2	-
	c) Pencegahan dan pengendalian kebakaran	2	-
	d) Keselamatan kerja mekanik	2	-
	e) Keselamatan kerja bejana bertekanan	2	-
	f) Keselamatan kerja alat angkat, angkut dan transportasi	2	-
	g) Keselamatan kerja bahan kimia berbahaya	3	-
	Penunjang:		
	1. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1	-
	2. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)	1	-
	3. Penatalaksanaan program penyalahgunaan alkohol dan NAPZA dan <i>human immuno deficiency virus/acquired immune deficiency syndrome</i> di tempat kerja	2	-
D	Praktek:		
	Laboratorium hiperkes dan keselamatan kerja	-	2
E	Kunjungan perusahaan	-	4
F	Diskusi	2	-
G	Evaluasi (awal dan akhir)	1	-
	Total	60	6



**Lampiran A**  
(normatif)

**Subpokok bahasan materi kurikulum pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi pengurus dan anggota P2K3 perusahaan**

**Tabel A.1 Subpokok bahasan materi kurikulum pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi pengurus dan anggota P2K3 perusahaan**

No	Mata ajar	Subpokok bahasan
A	Umum:	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian, ruang lingkup, tujuan dan sasaran hiperkes dan keselamatan kerja</li> <li>2. Kebijakan pokok Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang hiperkes dan keselamatan kerja</li> <li>3. Peraturan perundangan dan standar yang berkaitan dengan hiperkes dan keselamatan kerja</li> <li>4. Tugas pokok dan fungsi P2K3</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian hiperkes dan keselamatan kerja</li> <li>- Ruang lingkup</li> <li>- Tujuan dan sasaran hiperkes dan keselamatan kerja</li> <li>- Aspek-aspek hiperkes dan keselamatan kerja</li> <li>- Tugas pokok, fungsi dan program Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>- Permasalahan dan strategi</li> <li>- UU. No. 13 tahun 2003</li> <li>- UU. No. 1 tahun 1970</li> <li>- PP No. 7 tahun 1973</li> <li>- Kep. Presiden No. 22 tahun 1993</li> <li>- Kepmen. Tenaga kerja No. 51/Men/1999</li> <li>- Permen. Tenaga kerja No. 3 tahun 1998</li> <li>- Permen. Tenaga kerja No. 3 tahun 1982</li> <li>- Permen. Tenaga kerja No. 1 tahun 1981</li> <li>- Permen. Tenaga kerja No. 02 tahun 1980</li> <li>- Permen. Tenaga kerja No. 01 tahun 1976</li> <li>- P.M.P No. 7 tahun 1964</li> <li>- SE Menaker No.1 tahun 1997</li> <li>- Dasar hukum organisasi P2K3</li> <li>- Organisasi P2K3 tingkat perusahaan</li> <li>- Tugas P2K3</li> <li>- Fungsi P2K3</li> <li>- Program P2K3</li> </ul>
B.	Aspek teknis:	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Manajemen hiperkes dan keselamatan kerja</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisasi hiperkes dan keselamatan kerja</li> </ul>



Tabel A.1 (lanjutan)

No	Mata ajar	Subpokok bahasan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman penerapan hiperkes dan keselamatan kerja</li> <li>- Pengujian dan inspeksi hiperkes dan keselamatan kerja</li> <li>- Administrasi hiperkes dan keselamatan kerja di perusahaan</li> </ul>
	b) Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Pedoman penerapan SMK3</li> <li>- Audit SMK3</li> </ul>
	2. Higiene perusahaan:	
	a) Kebisingan dan getaran di tempat kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Pengenalan</li> <li>- Penilaian</li> <li>- Pengendalian</li> </ul>
	b) Iklim kerja panas di tempat kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Pengenalan</li> <li>- Penilaian</li> <li>- Pengendalian</li> </ul>
	c) Radiasi mengion dan tidak mengion	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Pengenalan</li> <li>- Penilaian</li> <li>- Pengendalian</li> </ul>
	d) Penerangan di tempat kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Pengenalan</li> <li>- Penilaian</li> <li>- Pengendalian</li> </ul>
	e) Faktor kimia di udara tempat kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Pengenalan</li> <li>- Penilaian</li> <li>- Pengendalian</li> </ul>
	f) Faktor biologi di tempat kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Pengenalan</li> <li>- Penilaian</li> <li>- Pengendalian</li> </ul>
	3. Kesehatan kerja:	
	a) Dasar-dasar kesehatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian, fungsi dan ruang lingkup</li> <li>- Pelayanan kesehatan kerja</li> <li>- Pengaruh faktor fisik, kimia, biologis</li> </ul>



Tabel A.1 (lanjutan)

No	Mata ajar	Subpokok bahasan
	b) Penyakit akibat kerja (PAK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Peraturan perundangan</li> <li>- <i>Surveillance</i></li> <li>- Pelaporan PAK</li> </ul>
	c) Gizi kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definisi dan ruang lingkup</li> <li>- Kecukupan gizi kerja</li> <li>- Tafsiran kebutuhan bahan makanan dan bahan penukar</li> <li>- Pengaruh lingkungan kerja</li> <li>- Penilaian kecukupan gizi</li> <li>- Pencegahan keracunan makanan</li> </ul>
	d) Toksikologi industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan standar</li> <li>- Monitoring</li> <li>- <i>Specimen</i> biologi</li> </ul>
	4. Ergonomi dan psikologi kerja:	
	a) Ergonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Prinsip ergonomi</li> <li>- Penerapan ergonomi di tempat kerja</li> </ul>
	b) Psikologi kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Teori kebutuhan</li> <li>- Aspek psikologi industri</li> <li>- Pengaruh psikis kondisi lingkungan kerja</li> </ul>
	5 Keselamatan kerja:	
	a) Keselamatan kerja umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Teori dasar tentang terjadinya kecelakaan kerja</li> <li>- Perilaku aman dalam bekerja</li> <li>- Investigasi kecelakaan kerja</li> <li>- Statistik kecelakaan kerja</li> <li>- Pencegahan kecelakaan kerja</li> <li>- Program tanggap darurat</li> <li>- Alat pelindung diri</li> </ul>
	b) Keselamatan kerja listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Identifikasi</li> <li>- Peraturan perundangan</li> <li>- Penilaian</li> <li>- Pencegahan bahaya listrik</li> </ul>
	c) Pencegahan dan pengendalian kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Teori kebakaran</li> <li>- Penyebab kebakaran</li> <li>- Pencegahan kebakaran</li> <li>- Jenis peralatan penanggulangan kebakaran</li> </ul>



Tabel A.1 (lanjutan)

No	Mata ajar	Subpokok bahasan
	d) Keselamatan kerja mekanik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Identifikasi bahaya mekanik</li> <li>- Pencegahan dan pengendalian bahaya mekanik</li> </ul>
	e) Keselamatan kerja bertekanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Bahaya yang ditimbulkan</li> <li>- Peraturan perundangan</li> <li>- Penilaian dan pengujian</li> <li>- Pemeliharaan</li> <li>- Pencegahan</li> </ul>
	f) Keselamatan kerja alat angkat, angkut dan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Identifikasi bahaya</li> <li>- Peraturan perundangan</li> <li>- Pemeliharaan</li> <li>- Pencegahan</li> </ul>
	g) Keselamatan kerja bahan kimia berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Peraturan perundangan dan Nilai Ambang Kuantitas (NAK)</li> <li>- Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB)</li> <li>- Penilaian penanganan (<i>chemical handling</i>)</li> <li>- Pencegahan</li> </ul>
C.	Penunjang:	
	1. Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Program komunikasi</li> <li>- Program informasi</li> <li>- Program edukasi</li> </ul>
	2. Pertolongan pertama pada kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Tugas dan fungsi</li> <li>- Peraturan perundangan</li> <li>- Visualisasi</li> </ul>
	3. Penatalaksanaan program penyalahgunaan alkohol dan NAPZA dan <i>Human immuno deficiency virus/acquired immune deficiency syndrome</i> di tempat kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan ruang lingkup</li> <li>- Dampak penyalahgunaan</li> <li>- Pencegahan</li> <li>- Penanggulangan</li> <li>- Kebijakan dan strategi</li> <li>- Gejala klinis, pencegahan dan pengobatan</li> <li>- Epidemiologi dan dampak</li> <li>- Kesehatan reproduksi penyakit menular seksual (PMS)</li> <li>- Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)</li> </ul>



Tabel A.1 (lanjutan)

No	Mata ajar	Subpokok bahasan
D.	Praktek:  Laboratorium hiperkes dan keselamatan kerja	Pengenalan dan demontrasi peralatan laboratorium hiperkes dan keselamatan kerja
E.	Kunjungan perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan penilaian hasil pengamatan penerapan hiperkes dan keselamatan kerja di perusahaan</li> <li>- Penyusun laporan hasil kunjungan perusahaan</li> </ul>
F.	Diskusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentasi kelompok</li> <li>- Diskusi panel</li> <li>- Rumusan hasil diskusi</li> <li>- Laporan akhir</li> </ul>
G.	Evaluasi	Mengukur keberhasilan proses pembelajaran





## Bibliografi

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per 04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan kerja.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP. 155/MEN/1984, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 125/MEN/1982 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Daerah, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No. 2 tahun 1970 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja.

Departemen Tenaga Kerja, Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Pusat Hiperkes dan Keselamatan Kerja tentang kurikulum pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Teknisi di perusahaan.























**BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN**  
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3,4,7,10  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270  
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : [bsn@bsn.go.id](mailto:bsn@bsn.go.id)